

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DESA KARANGWOTAN KECAMATAN PUCAKWANGI  
KABUPATEN PATI**

Ajib Mahendra<sup>1</sup>, Maesaroh<sup>2</sup>, Nina Widowati<sup>3</sup>



**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos. 1269

Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Changes in an increasingly advanced era require optimal development to be able to keep up with changing times. The development aims to realize people's welfare which is one of the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Decentralization makes it easy for each region to be able to carry out development based on the potential possessed by a region. However, infrastructure development in Karangwotan Village has not run optimally. This is due to the lack of community participation in infrastructure development in their area. Lack of community participation has an impact on infrastructure development that is not by community needs. This study aims to determine and analyze community participation in infrastructure development in Karangwotan Village, Pucakwangi District, Pati Regency, the inhibiting factors, and the driving factors for community participation in infrastructure development. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of the analysis and discussion in this study indicate that community participation in Karangwotan Village has not run optimally. This problem is caused by factors inhibiting participation such as a lack of public awareness in attending development planning activities (MUSRENBANGDes) and a lack of outreach by the government regarding the importance of community participation in infrastructure development. There are also factors driving community participation in development such as the opportunity to participate, the willingness to participate, and the ability to participate in the implementation of infrastructure development. Suggestions or recommendations in this study are to increase socialization carried out by the government to the community so that they understand the importance of their participation in infrastructure development in their area.*

**Keyword: analysis, community participation, infrastructure development**

---

<sup>1</sup> Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

<sup>3</sup> Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perubahan zaman yang semakin maju membutuhkan adanya pembangunan yang optimal untuk dapat mengikuti perubahan zaman. Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tentang tujuan NKRI.

Adanya desentralisasi memberikan kemudahan bagi setiap daerah untuk dapat melakukan pembangunan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Saat ini pemerintah tengah berfokus pada pembangunan infrastruktur di setiap daerah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, namun dalam pelaksanaannya pemerintah seringkali mengalami permasalahan khususnya di wilayah pedesaan.

Pembangunan desa sangatlah diperlukan untuk mencegah terjadinya ketimpangan antara pembangunan di pedesaan dan di perkotaan. Pembangunan infrastruktur dalam lingkup desa memiliki cakupan yang sangat luas Pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tentunya memerlukan adanya strategi yang matang untuk memberikan kelancaran dalam proses pembangunan infrastruktur desa.

Penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Desa Karangwotan dipilih sebagai lokus dalam penelitian karena saat ini pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi infrastruktur jalan Desa Karangwotan yang banyak terjadi kerusakan di berbagai titik yang didokumentasikan sebagai berikut ini:

**Gambar 1.2 Kondisi Infrastruktur Jalan di Desa Karangwotan**



Berdasarkan pada gambar yang didokumentasikan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kerusakan pada infrastruktur jalan di Desa Karangwotan. Kerusakan pada infrastruktur jalan desa tersebut menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat yang bergantung pada infrastruktur jalan desa. Desa Karangwotan sebagai sebuah desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani tentunya terhambat dalam mengerjakan pekerjaannya karena akses jalan mereka dari rumah menuju area persawahan memiliki kondisi yang kurang baik. Kondisi tersebut membutuhkan adanya solusi yang tepat dalam menanganinya sehingga permasalahan infrastruktur yang belum terbangun secara optimal ini dapat terselesaikan.

Partisipasi masyarakat yang aktif merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan di Desa Karangwotan belum tercapai secara maksimal. Contoh dari kurangnya partisipasi masyarakat adalah pada saat pelaksanaan MUSRENBANGDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) di Kantor Desa Karangwotan yang didokumentasikan dalam beberapa gambar berikut:

**Gambar 1.3 Pelaksanaan MUSRENBANGDes Karangwotan**



Berdasarkan pada gambar yang didokumentasikan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam MUSRENBANGDes belum dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat yang diundang. Ketidakhadiran masyarakat dalam menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan ide, gagasan, atau saran dalam proses pembangunan sehingga dapat menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat merugikan karena pelaksanaan pembangunan membutuhkan adanya kesamaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang optimal.

Berdasarkan daftar kehadiran peserta dalam MUSRENBANGDes, berikut adalah tabel kehadiran masyarakat dalam MUSRENBANGDes Karangwotan Tahun 2022:

**Tabel 1.4 Kehadiran Masyarakat dalam MUSRENBANGDes**

Kategori Peserta	Jumlah undangan	Jumlah hadir
Perangkat Desa	15	15
RT	27	20

RW	4	3
LPMD	10	5
BPD	9	5
Karang Taruna	5	2
Total	70	50
Persentase	100%	70%

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam MUSRENBANGDes Karangwotan belum berjalan secara maksimal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tersebut menyebabkan aspirasi masyarakat Desa Karangwotan tidak dapat tersalurkan secara menyeluruh dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Karangwotan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengedepankan adanya partisipasi atau peran serta masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan desa. Adanya partisipasi yang aktif diharapkan dapat mencegah serta menyelesaikan permasalahan pembangunan sehingga akan mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61-63) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terdiri atas partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur serta faktor penghambat dan pendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan?
2. Apakah faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan?
3. Apakah faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan.
3. Untuk menganalisis faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan.

## Kerangka Teori

### 1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) mengartikan administrasi publik sebagai proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dwight Waldo (dalam Pasolong, 2017:9) mengartikan administrasi publik sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada beberapa konsep administrasi publik yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses kerjasama yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah dalam organisasi publik dan

kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

### 2. Manajemen Publik

Manajemen publik menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014:92) merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi serta pemanfaatan sumber daya dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Henry Fayol (dalam Batlajery, 2016:139) menyebutkan setidaknya semua manajer melaksanakan beberapa fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasikan, dan mengendalikan dalam rangka untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan merupakan sebuah cabang keilmuan dari administrasi publik dimana mencakup sistem penganggaran, restrukturisasi organisasi, evaluasi sebuah program, serta manajemen sumberdaya.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara umum dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan seseorang atau kelompok orang sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Menurut Theodorson (dalam Theresia, 2015:196) partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya di luar pekerjaan atau profesinya.

### 4. Pembangunan Infrastruktur Desa

Sondang P. Siagian (Orocomna, 2013:3) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian usaha yang dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan serta perubahan secara terencana dan sadar yang dilakukan oleh suatu negara dan bertujuan untuk mewujudkan modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Berdasarkan pada definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu proses pembangunan berencana yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di desa.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dimanfaatkan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana pendekatan yang dimanfaatkan yakni deskriptif kualitatif. Lokasi atau lokus yang dipilih dalam penelitian adalah Desa Karangwotan dan situs penelitian adalah Pemerintah Desa Karangwotan. Dalam menentukan beberapa informan yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti memanfaatkan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan dalam penelitian yakni Kepala Desa Karangwotan, Kepala Dusun Karangwotan, Bendahara Desa Karangwotan, serta beberapa masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan beberapa instrumen penelitian, yaitu individu (peneliti) dan orang lain yang berkontribusi serta berperan sebagai perangkat dalam penelitian sekaligus pengumpul data. Terdapat juga instrumen penelitian lain berupa alat bantu dalam penelitian ini, seperti pedoman wawancara yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat mendukung instrumen kunci yakni peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersumber dari kata-kata, tindakan, dokumen, serta sumber tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber atau objek yang diteliti dan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan

### **a. Partisipasi dalam Perencanaan**

- Partisipasi Pikiran

Partisipasi pikiran dalam pembangunan di Desa Karangwotan adalah dengan melakukan penyampaian usulan atau gagasan secara bergantian dalam pelaksanaan MUSRENBANGDes. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Keith Davis (dalam Sastropetro, 1985:16) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui partisipasi pikiran. Masyarakat dapat dengan aktif menyampaikan usulan dan gagasan mereka sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut tergolong cukup tinggi

- Kehadiran dalam Musyawarah

Belum semua masyarakat yang diundang dapat menghadiri MUSRENBANGDes di Desa Karangwotan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam hal partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, proses pembangunan akan lebih mudah dilaksanakan, karena masyarakat akan lebih memahami dan mendukung proyek pembangunan yang sedang dilakukan. Adanya umpan balik dari masyarakat dapat dijadikan oleh pemerintah untuk mengukur sejauh mana proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apakah proyek tersebut telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, kehadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan sangat penting untuk menjamin kesuksesan suatu proyek pembangunan. Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar pembangunan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- Pengambilan Keputusan

Anzizhan (2004:89) mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai suatu

proses dalam menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menentukan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. pelaksanaan pengambilan keputusan yang dilakukan di Desa Karangwotan dilakukan secara bersama-sama melalui kegiatan MUSRENBANGDes untuk menentukan prioritas pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan. Prioritas pembangunan yang telah ditentukan secara bersama-sama kemudian akan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk ditentukan besarnya anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur

#### b. Partisipasi dalam Pelaksanaan

- Partisipasi Tenaga

Masyarakat Desa Karangwotan melakukan partisipasi tenaga dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan. Masyarakat dapat melakukan partisipasi tenaga secara sukarela dan berdasarkan pada kesadaran mereka sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya. Adanya partisipasi tenaga yang dilakukan oleh masyarakat akan membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk berjalan dengan lebih cepat. Masyarakat umumnya melakukan kegiatan gotong-royong untuk membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur karena manfaat yang dapat diambil dari infrastruktur yang telah dibangun akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adanya partisipasi tenaga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangwotan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keith Davis (Dalam Sastropetro, 1985:16) yang mengemukakan bahwa adanya partisipasi tenaga merupakan salah satu hal yang harus ada dalam setiap pembangunan di suatu daerah karena manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah yang sedang melaksanakan pembangunan

- Partisipasi Barang

Partisipasi masyarakat dalam partisipasi barang tergolong cukup baik karena masyarakat dapat dengan sukarela meminjamkan barang-barang atau peralatan yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan seperti angkong, linggis, cangkul. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Keith Davis (dalam Sastropetro, 1985:16) yang menjelaskan bahwa partisipasi barang atau *material participation* dapat dilakukan dengan memberikan atau meminjamkan barang yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di suatu daerah.

- Partisipasi Uang

Masyarakat Desa Karangwotan belum dapat melakukan partisipasi uang yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini tidak sesuai dengan teori partisipasi uang yang dikemukakan oleh Keith Davis (dalam Sastropetro: 1985:16) bahwa partisipasi uang merupakan salah satu bentuk partisipasi yang sangat penting untuk mempercepat pembangunan. Teori tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2000:18) yang intinya menjelaskan bahwa pembangunan bukanlah hanya sebuah fenomena semata, melainkan pembangunan harus melampaui sisi metro dan uang dari sisi manusia. Hal tersebut menjelaskan bahwa partisipasi uang dalam pembangunan sangatlah penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Belum adanya partisipasi uang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangwotan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang ini termasuk dalam kategori kurang/rendah sehingga dibutuhkan adanya solusi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan uang terhadap pembangunan di wilayahnya.

#### c. Partisipasi dalam Pemanfaatan

- Partisipasi dalam Pemanfaatan

Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dihasilkan di Desa Karangwotan telah memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Soetomo (2009:12) yang menjelaskan bahwa partisipasi dalam pemanfaatan hasil dapat diwujudkan melalui keterlibatan seseorang dalam tahap pemanfaatan dari pembangunan setelah pembangunan tersebut telah selesai dikerjakan.

- Partisipasi dalam Pemeliharaan Masyarakat Desa Karangwotan melakukan berbagai macam cara untuk memelihara infrastruktur yang telah dibangun di wilayahnya. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang positif untuk memelihara dan menjaga infrastruktur yang telah dibangun untuk dapat dimanfaatkan. Kegiatan pemeliharaan hasil pembangunan infrastruktur dilakukan secara sukarela oleh masyarakat karena mereka sadar akan pentingnya partisipasi yang harus dilakukan untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan infrastruktur. Kegiatan tersebut dilakukan dengan kerja bakti secara gotong royong karena seluruh masyarakat dapat mengambil manfaat dari adanya infrastruktur tersebut sehingga mereka memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara infrastruktur sebaik mungkin supaya manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka Panjang.

#### d. Partisipasi dalam evaluasi

- Efektivitas Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Kriteria yang diukur dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Efisiensi

Kriteria efisiensi dapat diartikan sebagai pengukuran terhadap waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Setiap objek pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan memiliki target waktu penyelesaian pembangunan infrastruktur. pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan efisien karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat memenuhi Batasan waktu yang telah ditentukan.

- Kecukupan

Kriteria kecukupan yang diukur dalam penelitian ini adalah kecukupan dana yang dialokasikan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan. Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangwotan dilaksanakan berdasarkan pada RPD (Rencana Penggunaan) yang didalamnya memuat tentang besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karangwotan. Besarnya dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan sudah cukup sehingga hasil pembangunan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

- Pemerataan

Kriteria pemerataan dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai pemerataan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Karangwotan. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan dilaksanakan secara bertahap atau bergantian dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap tersebut dilakukan karena adanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sehingga hanya prioritas pembangunan infrastruktur yang didahulukan terlebih dahulu. pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan belum merata karena pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap dan bergantian dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pembangunan di Desa Karangwotan dilakukan

berdasarkan prioritas pembangunan yang dibahas dalam MUSRENBANGDes. Masyarakat Desa Karangwotan sangat berharap pembangunan di Desa Karangwotan khususnya pembangunan infrastruktur bisa merata ke setiap wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

- Responsivitas

Kriteria responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Responsivitas yang dinilai dalam penelitian ini adalah bagaimana respon/tanggapan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan di wilayahnya. masyarakat Desa Karangwotan memberikan respon positif terhadap pembangunan yang berjalan di wilayah mereka. Masyarakat juga melakukan partisipasi secara aktif untuk mendukung pelaksanaan pembangunan untuk dapat berjalan dengan lebih baik karena manfaatnya dari pembangunan tersebut akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

- Ketepatan

Kriteria ketepatan yang dinilai dalam penelitian ini adalah apakah hasil pembangunan pembangunan infrastruktur yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang dibangun.

## 2. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

### a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri musyawarah pembangunan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk

menghadiri musyawarah pembangunan yang dilakukan pada MUSRENBANGDes. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam bidang ini menyebabkan ide-ide atau gagasan mereka tidak dapat tersalurkan atau tersampaikan dalam kegiatan perencanaan. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh kesibukan masyarakat sehingga tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut tentunya sangat merugikan karena pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baik seharusnya didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur yang direncanakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat. masyarakat Desa Karangwotan belum memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Permasalahan tersebut membutuhkan adanya solusi seperti meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai program sosialisasi akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap musyawarah, khususnya musyawarah pembangunan infrastruktur.

### b. Kurangnya Sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat

Menurut Sutaryo (2004:230) sosialisasi merupakan suatu proses mengenalkan suatu sistem kepada seseorang atau kelompok orang dan melihat bagaimana respon atau tanggapan yang diberikan dari pengenalan tersebut. Sosialisasi pembangunan infrastruktur merupakan suatu proses penyampaian informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami serta mengetahui manfaat dan tujuan dari pembangunan infrastruktur tersebut, serta dapat memberikan masukan yang berguna untuk perbaikan rencana pembangunan. Akan tetapi, pelaksanaan sosialisasi pembangunan infrastruktur tidak berjalan secara efektif. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami

tujuan dan manfaat dari pembangunan infrastruktur sehingga mereka merasa kurang terlibat dalam proses pembangunan. Sosialisasi terkait rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kurang efektif dan sangat minim.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah harus melakukan sosialisasi pembangunan infrastruktur secara efektif dan dilakukan secara terus menerus agar masyarakat dapat memahami manfaat dari pembangunan infrastruktur dan ikut serta memberikan masukan yang bermanfaat. Pemerintah juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang proyek pembangunan infrastruktur, serta mengadakan diskusi dan konsultasi terbuka dengan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami tujuan dan manfaat dari pembangunan infrastruktur, sehingga mereka dapat mendukung dan mengikuti proses pembangunan dengan lebih baik.

### 3. Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur.

#### a. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi

Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi. Partisipasi masyarakat dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti melalui pemilihan umum, konsultasi publik, dan forum diskusi. Partisipasi masyarakat sangat penting karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat mereka terkait kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah. Ini juga memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, karena masyarakat dapat mengawasi tindakan pemerintah dan memberikan masukan jika diperlukan. Ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membantu menciptakan masyarakat yang lebih terintegrasi dan terikat. Pemerintah Desa Karangwotan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi masyarakat Desa Karangwotan untuk dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan. Tujuan dari pemberian kesempatan tersebut adalah supaya masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan mereka.

#### b. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi

Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan yang terkait dengan pembangunan di daerah mereka. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dapat membantu meningkatkan efektivitas pembangunan, karena masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat memberikan masukan yang berguna dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi resiko konflik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan.

Untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, diperlukan komitmen dari pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya untuk terbuka dan memperhatikan masukan masyarakat.

Selain itu, perlu adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, seperti melalui forum komunitas atau musyawarah masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui beberapa tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Masyarakat Desa Karangwotan mau terlibat dalam pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur. Namun kurangnya kehadiran masyarakat dalam menghadiri musyawarah dalam perencanaan

c. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan faktor penting dalam proses pembangunan infrastruktur. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat Pendidikan, akses informasi, dan kepemilikan sumber daya. Masyarakat yang memiliki tingkat Pendidikan lebih tinggi dan akses informasi yang luas akan lebih mampu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, diperlukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan akses informasi masyarakat, serta memberikan akses yang adil terhadap sumber daya yang tersedia. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, seperti melalui forum komunitas atau musyawarah masyarakat. Secara umum masyarakat Desa Karangwotan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayahnya, namun terdapat beberapa kekurangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadiri musyawarah

perencanaan menyebabkan kegiatan tersebut belum berjalan secara optimal sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi infrastruktur di Desa Karangwotan yang masih banyak terjadi kerusakan dan belum sebaik infrastruktur di beberapa Desa di sekitar Desa Karangwotan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui beberapa metode penelitian dapat diketahui bahwa terdapat berbagai macam bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Karangwotan, tetapi terdapat juga beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang belum dapat terpenuhi dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan belum dapat berjalan dengan optimal.

Secara garis besar pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih terdapat beberapa permasalahan dari beberapa indikator partisipasi masyarakat yang ada sehingga menyebabkan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan belum berjalan secara efektif dan membutuhkan adanya solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan, antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan kurangnya

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Masyarakat Desa Karangwotan belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk hadir dalam kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur sehingga ide-ide atau gagasan yang mereka miliki tidak dapat tersampaikan. Disisi lain, pemerintah belum dapat melakukan sosialisasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sehingga dibutuhkan adanya peningkatan pada kegiatan sosialisasi tersebut. Tujuannya dari peningkatan sosialisasi tersebut adalah untuk menginformasikan masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari pembangunan infrastruktur sehingga mereka menjadi sadar akan pentingnya partisipasi mereka dalam pembangunan infrastruktur di desa,

Selain faktor penghambat, terdapat juga faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan. adanya kesempatan dalam berpartisipasi, adanya kemauan untuk berpartisipasi, dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Secara garis besar terdapat beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan. Faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sehingga dibutuhkan adanya peningkatan pada sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan dapat berjalan secara optimal

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan, masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi penyebab dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan yang belum terlaksana secara

optimal. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti ingin memberikan saran atau rekomendasi baik pada pemerintah Desa Karangwotan ataupun masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan dapat berjalan secara optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 .

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Karangwotan, pemerintah desa dapat memberikan sosialisasi yang lebih baik serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, tujuannya adalah untuk menyamakan pikiran terkait pemilihan prioritas pembangunan.

Sehubungan dengan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, masyarakat hendaknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah mereka karena masyarakat memiliki peran yang penting untuk terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur sebagai penerima manfaat dari hasil pembangunan yang telah dilakukan

### **DAFTAR PUSTAKA**

Buku:

- Anzizhan, S. (2004). *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Dwiningrum, S. I. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gava Media.

- Sastropoetro, S. (1985). *partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Alumni.
- Soetomo. (2019). *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sutaryo. (2004). *Dasar-dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G., & Totok, M. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Jurnal:
- Djiko, R. & Delensang, R. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan dana Desa Pitu. *J3P: Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah Volume 6, Nomor 1*, 1-15
- Dwijosusilo, K., Shafiyah, S., (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *JIMPKS: Jurnal Ilmu Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Volume 4, Nomor 2*, 143-156
- Henry Fayol. Batlajery, Semuel. 2016. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial Volume 7, No 2*, 135-155
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *GROWTH: Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1*, 75-98
- Ismatullah, & Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance Volume 3, Nomor 1*, 1-11
- Jacob, A. R. P., Anggraini, T. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Penfui Timur (Studi Kasus Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah–Kabupaten Kupang). *Politicon: Jurnal Program Studi Ilmu Politik Volume 10, Nomor 1*, 1-8
- Orocomna, Lukas. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Meristim Distrik Maskona Utara). *Jurnal Governance Vol 5, No. 1*, 1-8
- Rizal, S., Zuriah, N., & Tinus, Agus. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Civic Hukum Volume 4, Nomor 1*, 38-47
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R., (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *HULONDALO: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Volume 1, Nomor 1*, 18-33
- Setiawan, A. dkk. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung Studi Kasus di Desa Margamukti, Desa Sayati, Desa Ciburial dan Desa Nanjung Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja Volume 3, Nomor 3, 251-270*

Sudrajat, A., & Nurkolis. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Desa Kidang Pananjung Kecamatan Cililin Kabupaten Barat. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Volume 6, Nomor 1, 87-105*

Wahyuddin, M., Mustari, H., & Harna. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Phinisi Integration Review Volume 3, Nomor 1. 90-99*

Lain-Lain:

Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat tentang tujuan NKRI

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Pasal 1 Ayat 9

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 9 angka 6

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desentralisasi